

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pembangunan daerah merupakan salah satu asas desentralisasi menurut ketentuan umum UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, desentralisasi yaitu penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perwujudan dari asas desentralisasi adalah berlakunya otonomi daerah. Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberi kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan pemerintah pusat. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Penyelenggaraan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab diperlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumber keuangan sendiri yang didukung oleh perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, serta antara provinsi dan kabupaten/kota. Pendapatan asli daerah (PAD), Dana alokasi umum (DAU), dan Dana alokasi khusus (DAK) merupakan sumber keuangan pemerintah daerah. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan otonomi, peningkatan PAD selalu diupayakan karena merupakan penerimaan dari usaha untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah. Peningkatan PAD harus berdampak pada perekonomian daerah.

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana efektivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Indikator yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi adalah tingkat pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) yang mencerminkan nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh aktivitas produksi didalam perekonomian. Pertumbuhan ekonomi mempunyai kaitan erat dengan sumber pendapatan daerah. Dimana sumber pendapatan adalah hal yang utama dalam melakukan belanja daerah guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi haruslah sejalan dengan penerimaan daerah yang bersumber dari Dana perimbangan (DAU dan DAK) serta dari dana yang berasal dari penerimaan asli daerah (PAD). Sumber penerimaan yang besar diharapkan mampu mendorong angka pertumbuhan ekonomi semakin besar pula.

Di Provinsi Gorontalo Pertumbuhan Ekonomi tidak mampu sejalan dengan angka penerimaan daerah. Hal ini tergambar dari data tahunan yang dirilis oleh BPS Provinsi Gorontalo. Persentase yang ditunjukkan menggambarkan di beberapa tahun terjadi peningkatan penerimaan dari sisi PAD, DAU dan DAK namun hal demikian tidak sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang dari tahun 2013 hingga 2019 mengalami kenaikan dan penurunan.

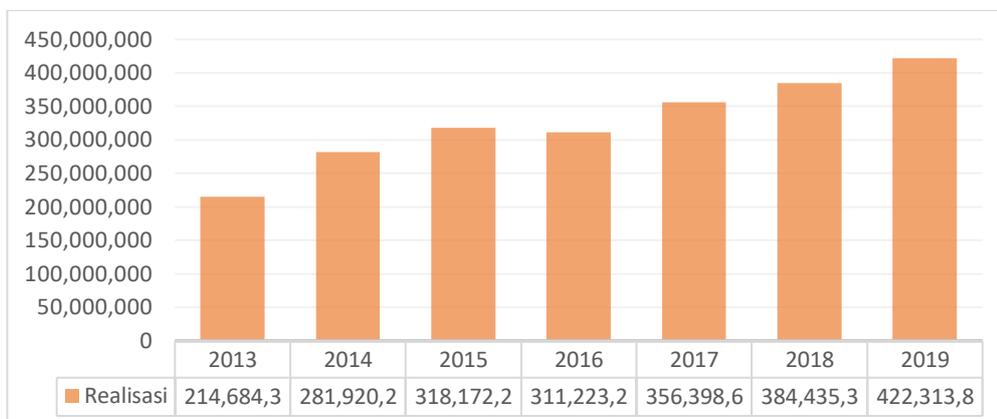
**Grafik 1.1 Laju pertumbuhan ekonomi  
Provinsi Gorontalo Tahun 2013-2019**



*(Sumber: BPS provinsi gorontalo 2019).*

Tahun 2013 pertumbuhan ekonomi di provinsi gorontalo mencapai 7,76%, kemudian pada tahun 2014 mengalami penurunan sekitar 0,47% hingga pertumbuhan ekonomi tahun 2014 hanya mencapai 7,29% tahun 2015 pertumbuhan ekonomi kembali mengalami penurunan 1,07% dari tahun sebelumnya 7,29% tahun 2015 hanya 6,22%, tahun 2016 pertumbuhan ekonomi kembali mengalami kenaikan 0,30% dan pertumbuhan ekonomi tahun 2016 mencapai 6,52%, kemudian pada tahun 2017 pertumbuhan ekonomi kembali mengalami kenaikan hingga 0,21% dan mencapai 6,73%, namun pada tahun 2018 pertumbuhan ekonomi kembali mengalami penurunan sebesar 0,23% dan pertumbuhan ekonomi berada di angka 6,5% kemudian pada tahun 2019 pertumbuhan ekonomi kembali mengalami penurunan sebesar 0,9% dan pertumbuhan ekonomi hanya mencapai 6,41%.

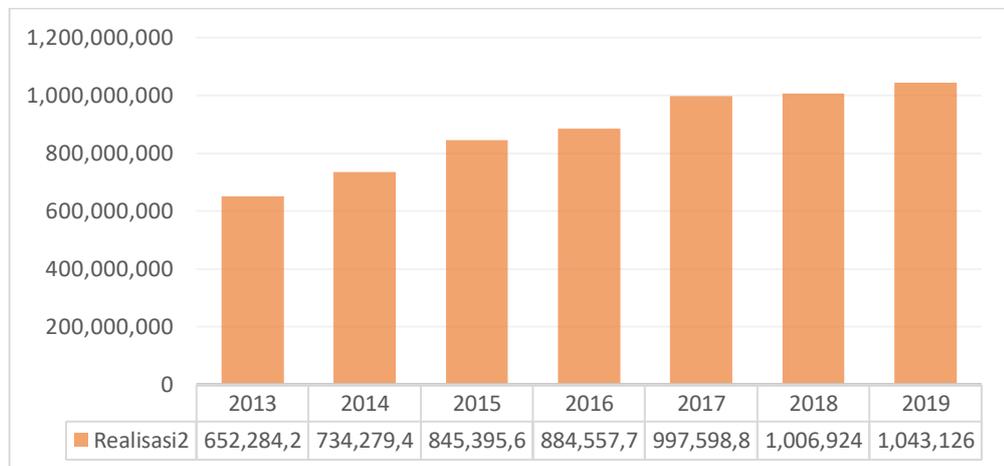
**Grafik 1.2 Realisasi PAD Prov. Gorontalo  
Tahun 2013-2019**



*(Sumber: BPS provinsi Gorontalo 2019).*

Seperti terlihat pada grafik di atas realisasi dana pendapatan asli daerah provinsi Gorontalo setiap tahunnya mengalami peningkatan dari tahun 2013 realisasi pendapatan asli daerah hanya 214.684.37, Tahun 2014 mencapai 281.920.21, tahun 2015 realisasi PAD berada di angka 318.172.26, tahun 2016 realisasi PAD mengalami penurunan sebesar 311.223.20, tahun 2017 realisasi PAD kembali mengalami kenaikan sebesar 356.398.68, tahun 2018 hingga tahun 2019 realisasi PAD seperti terlihat pada grafik di atas mengalami peningkatan, tahun 2018 berada di angka 384.435.30 dan tahun 2019 mencapai angka 422.313.80

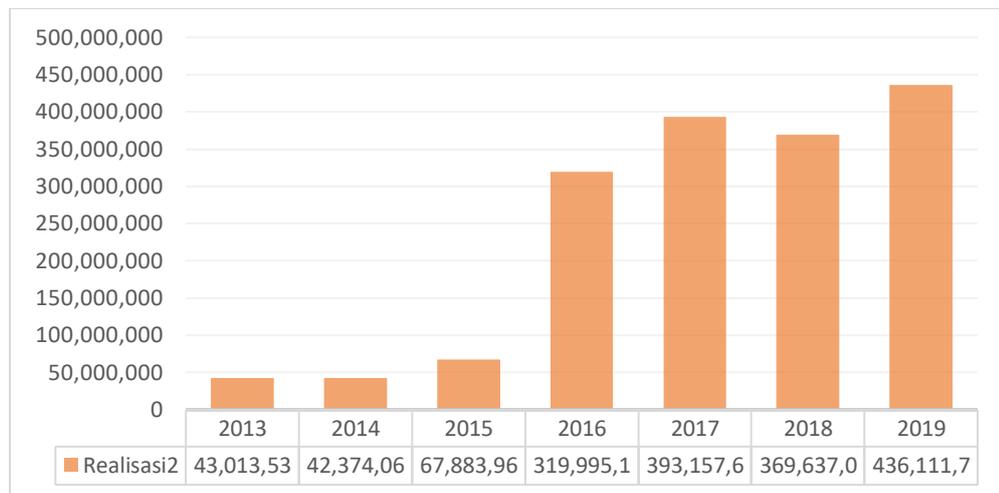
**Grafik 1.3 Realisasi DAU Prov. Gorontalo  
Tahun 2013-2019**



*(Sumber: BPS provinsi Gorontalo 2019).*

Realisasi Dana Alokasi Umum provinsi Gorontalo tahun 2013 berada di angka 652.284.2, tahun 2014 mengalami kenaikan dan mencapai 734.279.4, tahun 2015 realisasi DAU mencapai angka 845.395.6, tahun 2016 kembali mengalami kenaikan dan mencapai angka 884.557.7, tahun 2017 realisasi DAU 997.595.8, tahun 2018 1.006.942, dan pada tahun 2019 realisasi DAU mencapai angka 1.043.126

**Grafik 1.4 Realisasi DAK Prov. Gorontalo  
Tahun 2013-2019**



(Sumber: BPS provinsi Gorontalo 2019).

Terlihat pada grafik di atas realisasi Dana Alokasi Khusus provinsi Gorontalo dari tahun 2013-2019 setiap tahunnya mengalami kenaikan, terlihat pada tahun 2013 realisasi DAK berada di angka 43.013.530, tahun 2014 42.374.060, kemudian tahun 2015 mencapai angka 67.883.960, tahun 2016 hingga tahun 2019 terlihat jelas pada grafik bahwa realisasi DAK setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan.

Dari gambaran data hingga penjelasan grafik di atas, dapat dilihat bahwa pertumbuhan ekonomi provinsi Gorontalo mengalami penurunan dan kenaikan dari tahun 2013-2019 dan berbanding terbalik dengan penerimaan daerah yang bersumber dari PAD, DAU dan DAK. Sehingga dalam penelitian ini peneliti mengerucutkan subjek pembahasan dalam konteks “ *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Gorontalo Tahun 2013-2019*”.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan dari tahun 2013 hingga 2019, sementara sisi penerimaan yang bersumber dari PAD, DAU dan DAK setiap tahun terus meningkat.
2. Pengalokasian anggaran yang bersumber dari PAD, DAU dan DAK kurang memberikan kontribusi yang dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimanakah Pengaruh PAD, DAU, dan DAK terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Gorontalo?

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui Pengaruh PAD, DAU, dan DAK terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Gorontalo.

## **1.5 Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian ini, ada beberapa manfaat yang diperoleh yang diklasifikasikan penulis menjadi:

### **1.5.1 Manfaat Teoritis**

1. Menambah ilmu pengetahuan dan melengkapi perbendaharaan karya ilmiah serta memberikan kontribusi pemikiran mengenai pengaturan sumber-sumber keuangan daerah dan mengenai kebijakan pemerintah daerah dalam mengatur sumber-sumber PAD, DAU dan DAK beserta pengalokasiannya di Provinsi Gorontalo.
2. Sebagai bahan perbandingan bagi penelitian selanjutnya.

### **1.5.2 Manfaat Praktis**

1. Memberikan kontribusi pemikiran kepada masyarakat tentang kebijakan Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam pengaturan sumber APBN yang merupakan daerah otonom baru.
2. Memberikan masukan kepada Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam hal pengaturan sumber APBD sehingga berdampak pada kesejahteraan masyarakat provinsi Gorontalo.